PEMERINTAH KOTA TEGAL

TAHUN

2026



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA TEGAL

PEMERINTAH KOTA TEGAL

RENCANA KERJA
TAHUN 2026

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA TEGAL

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2026. Rencana Kerja ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2029. Penyusunan Renja ini telah berupaya memperhatikan permasalahan dalam urusan wajib pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang saat ini terjadi maupun yang masa mendatang dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tersusunnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2026 merupakan wujud kepedulian OPD dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Tegal sebagai salah satu daerah otonomi. Selain itu sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Tegal dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang ke arah yang lebih baik sesuai dengan Visi dan Misi Kota Tegal.

Kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) ini bermanfaat, terutama sebagai sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal yang semakin baik. Semoga Allah SWT senantiasa selalu membimbing kita, Amiin.

Tegal, 21 Juli 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA TEGAL

Ir. EKO SETYAWAN, MUM
Pembina Utama Muda
NIP.196509201996031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .. 21

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 24

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31

3.1. Telaahan Terhadap Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan Nasional .. 31

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 34

4.1. Rumusan Program dan Kegiatan 34

4.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan 36

4.3. Kesesuaian Rumusan Program dan Kegiatan Dengan Ranwal RKPD 38

BAB V PENUTUP 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 12

Tabel 2.2. Lokasi Kelurahan Kumuh Kota Tegal Tahun 2022 18

Tabel 2.3. Capaian Pengurangan Kumuh Kota Tegal Tahun 2024 18

Tabel 2.4. Persentase Luasan Kawasan Kumuh di Kota Tegal 19

Tabel 2.5. Persentase Luasan Permukiman Layak Huni 20

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024 21

Tabel 2.7. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 23

Tabel 2.8. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Tegal Tahun 2026 25

Tabel 2.9. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran 33

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju Tahun 2026 39

Tabel 4.2. Rencana Kerja Anggaran Sub Kegiatan Tahun 2026 42

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4

Grafik 2.1. Luasan Kawasan Kumuh di Kota Tegal Tahun 2020 – 2024 19

Grafik 2.2. Persentase Luasan Permukiman Layak Huni 21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu pelaksanaan amanat Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.

Sebagai bahan penyusunan RKPD, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD. Penyusunan Renja OPD harus ada keterkaitan dan konsistensi dengan Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahun.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan setiap Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja 2026 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang disusun melalui tahap-tahap penjaringan aspirasi masyarakat dalam musrenbang serta dibahas bersama Perangkat Daerah terkait dalam Forum Perangkat Daerah serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran daerah Kota tegal Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 63) ditindaklanjuti

dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Susunan Renja 2026 berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2024, perkiraan realisasi di Tahun 2025 serta evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal. Selain itu juga berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal pada Tahun 2026. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pada Tahun 2026, baik terhadap target capaian kinerja maupun anggaran. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Renja ini merupakan tahun ke-2 dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kota Tegal merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Tegal.
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencananaan untuk waktu 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal serta penyusunan RKPD Kota Tegal setiap tahunnya.
c. Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Kota Tegal yang telah ditetapkan.

d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tegal merupakan dokumen perencanaan Kota Tegal untuk periode 1 (satu) tahun dan penjabaran dari RPJMD Kota Tegal. RKPD Kota Tegal menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya RKPD Kota Tegal menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kota Tegal.
e. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal sebagai dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal dan RKPD Kota Tegal.

Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan disesuaikan dengan pelaksanaan Renja K/L dan Renja Provinsi, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang didanai oleh pusat maupun provinsi. Dokumen Renja yang telah disahkan akan menjadi dasar dalam pembahasan untuk menentukan besarnya RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang akan diurai lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal disusun dengan tahapan :

A. Persiapan Penyusunan
   a. Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
   b. Orientasi Mengenai Renja Perangkat Daerah;
   c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan;
   d. Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
B. Penyusunan Rancangan Awal

   Penyusunan Rancangan Awal berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
C. Penyusunan Rancangan

   Penyusunan Rancangan Renja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja dengan mereview terhadap rancangan awal RKPD dan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
D. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

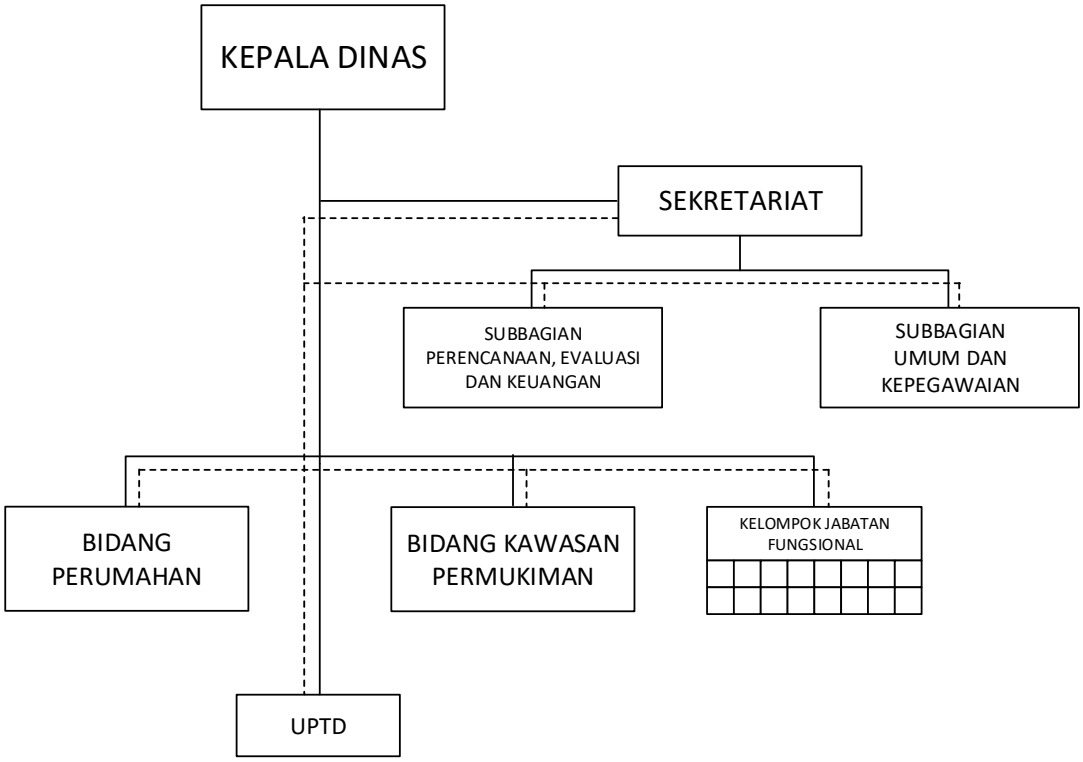
E. Perumusan Rancangan Akhir, dan

F. Penetapan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) mempunyai tugas pokok ***membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman***.

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Dinas Perumahan dan Kawasan Kota Tegal



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh;
7. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2025 – 2026;
10. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
11. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Surat Edaran Wali Kota Tegal Nomor 000.7.2.4/001 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026, serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini adalah sebagai acuan untuk menyusun perencanaan Tahun 2026 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2026 adalah :

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program dalam mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan dan lima tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tegal ini disusun dengan sistematika sebagi berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat

Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK.

2.3. Isu-Isu Penting/Strategis Dalam Penyelenggaraan Tugas & Fungsi

Dalam bagian ini berisikan tentang uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kecamatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan & Prioritas Pembangunan Nasional

Berisikan penelaahan yang menyangkut kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelesan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang rinci menurut sumber pendanaan.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup diantaranya catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal secara umum sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan target. Apabila dilihat dari indikator kinerja rata-rata telah mencapai target. Dari 5 Program 14 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan ada 6 sub kegiatan yang capaiannya di bawah 80% antara lain:

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan pagu anggaran sebesar Rp243.266.389,- dan realisasinya sebesar Rp 140.993.562,- atau sekitar 57,96%;
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dengan pagu anggaran Rp 33.524.000,- dan realisasinya sebesar Rp 15.385.000,- atau sekitar 45,89%.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran Rp19.200.000,- dan realisasinya sebesar Rp 13.950.000,- atau sekitar 72,66%.
4. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran Rp 7.200.000,- dan realisasinya Rp 4.450.000,- atau sekitar 61,81%.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran Rp 802.999.500,- dan realisasinya sebesar Rp 633.455.289,- atau sekitar 78,89%.
6. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran Rp 55.455.200,- dan realisasinya sebesar Rp 38.557.000,- atau sekitar 69,53%.

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target adalah :

a. Pemakaian anggaran sesuai kebutuhan yang ada;
b. Terdapat anggaran belanja yang realisasinya tidak dapat diprediksi dengan pasti;
c. Efesiensi anggaran.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, berdasarkan program utama yang dilaksanakan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel : 2.1.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal
Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9	10
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase Capaian Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase Capaian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah terfasilitasi**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	4	4	3	3
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	-	-	1	1	1	1
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	-	-	1	1	1	1
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	-	-	1	1	1	1
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	-	-	1	1	1	1
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	-	-	38	32	30	*30*
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	12	12	12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9	10
1.04.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Penataan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah terfasilitasi**	**Persen**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**
1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	12
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah terfasilitasi**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**Persen**	5	5	5	5	5	5
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	37	37	36	36	37	35
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25	25	35	35	34	34
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1.200	1.181	1	1	2	1
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	6	5	5	4	4
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan-Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	1	1	1	1	-	-
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	480	215	12	12	12	12
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	12
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah terfasilitasi**	**Persen**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**
1.04.01.2.07.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	328	328	-	-
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terfasilitasi**	**Persen**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	3	3	3	3
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terfasilitasi**	**Persen**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11	11	11	9	9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9	10
1.04.01.2.09.03	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jenis	2	2	11	11	-	-
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	56	56	64	48	58	54
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian**	**Persen**	**77,53**	**78,56**	**77,76**	**78,91**	**77,99**	**79,49**
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persen**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persen**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit rumah	**-**	-	11	11	14	7
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun**	**Persen**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	1	1	1	1	1	1
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Persen**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	1
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase pencegahan dan penanganan kawasan kumuh**	**Hektar**	**2,31**	**2,34**	**2,36**	**2,39**	**2,41**	**2,44**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9	10
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Prosentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh**	**Persen**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	1	1	1	1	1
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	1	1	1	-	-
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Prosentase capaian kegiatan pembangunan pemugaran permukiman kumuh**	**Persen**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelanggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelanggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Laporan	1	1	1	1	1	1
1.04.03.2.03.013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Hektar	-	-	0,90	32,98	0,20	0,20
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**Persen**	**97,72**	**98,81**	**98,04**	**98,83**	**98,36**	**98,84**
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase RTLH yang terfasilitasi**	**Persen**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	481	481	513	513	465	464
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan PSU Perumahan**	**Persen**	**35,59**	**42,42**	**44,07**	**50,79**	**52,54**	**63,49**
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Terfasilitasinya Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan**	**Persen**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1	1	1	1	15	15
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	30	30	13	13	22	22
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	5	5	1	1	5	5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2025-2026 dan Renstra 2025-2026, yaitu Presentase Luasan Kawasan Permukiman Layak Huni.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi badan terpadu. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Penyelenggaraan kawasan permukiman tersebut bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

Permukiman merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari deretan lima kebutuhan hidup manusia yaitu pangan, sandang, permukiman, pendidikan dan kesehatan, nampak bahwa permukiman menempati posisi yang sentral, dimana peningkatan permukiman akan meningkatkan pula kualitas hidup manusia.

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya penanganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan kumuh dan munculnya kawasan-kawasan kumuh baru. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya.

Pada akhir tahun 2020, berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pasal 29 menyebutkan bahwa penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran masyarakat dan Pasal 38 menyebutkan bahwa penetapan lokasi permukiman kumuh dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Dan mendasari program Presiden Republik Indonesia yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tujuan 11 Target 11.1. Kebutuhan perumahan dan permukiman menjadi salah satu indikator dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Sustainable Development Goals (SDG's). Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman dan terjangkau dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh : 38.30% ➔ 52.78%. Capaian dan target pembangunan infrastruktur PPAS Kementrian PUPR tahun 2020 – 2024 Bidang Cipta Karya salah satunya adalah penanganan 10.000 Ha pembangunan kawasan kumuh. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melaksanakan deliniasi kawasan kumuh baru.

Setelah dilakukan peninjauan dan pendataan ulang untuk lokasi dan luasan kawasan permukiman kumuh dengan indikator kekumuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh terjadi penambahan lokasi dan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sehingga berpengaruh pada luasan permukiman layak huni.

Berdasarkan perhitungan deliniasi kekumuhan di Kota Tegal terdapat 7 (tujuh) kelurahan yang masuk ke dalam kategori kumuh yang telah ditetapkan oleh SK Wali Kota Tegal No. 648/048.1 Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Lokasi Kelurahan Kumuh Kota Tegal Tahun 2022

No	Kelurahan	Kecamatan	Luasan Kumuh (Ha)	Tingkat Kekumuhan
1	Margadana	Margadana	24,46	Kumuh Ringan
2	Pesurungan Lor	Margadana	1,49	Kumuh Ringan
3	Sumurpanggang	Margadana	30,51	Kumuh Ringan
4	Bandung	Tegal Selatan	40,44	Kumuh Ringan
5	Debong Tengah	Tegal Selatan	3,72	Kumuh Ringan
6	Panggung	Tegal Timur	1,90	Kumuh Ringan
7	Mintaragen	Tegal Timur	3,02	Kumuh Ringan
8	Slerok	Tegal Timur	0	Tidak Kumuh
	TOTAL		**105,54**	

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, 2022

Selama tahun 2023 dilaksanakan penanganan permukiman kumuh di 7 (tujuh) lokasi kelurahan kumuh, sehingga terjadi penurunan luasan kumuh yang semula sebesar 105,54 Ha di akhir tahun 2023 luasan kumuh di Kota Tegal menjadi sebesar 60,08 Ha. Kemudian di tahun 2024 juga telah dilaksanakan penanganan permukiman kumuh di 5 (lima) lokasi kelurahan kumuh seluas 22,28 hektar, sehingga sisa luas kumuh di akhir tahun 2024 sebesar 37,80 hektar.

Berikut ini adalah tabel capaian penangangan kumuh di Kota Tegal selama tahun 2024 :

Tabel 2.3
Capaian Pengurangan Kumuh Kota Tegal Tahun 2024

No	Kelurahan	Kecamatan	Luasan Kumuh Awal Tahun 2024 (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh Tahun 2024 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh Akhir Tahun 2024 (Ha)
1	Margadana	Margadana	17,52	5,27	12,25
2	Pesurungan Lor	Margadana	1,38	1,38	0,00
3	Sumurpanggang	Margadana	15,26	9,76	5,50
4	Bandung	Tegal Selatan	24,85	4,80	20,05
5	Mintaragen	Tegal Timur	1,07	1,07	0,00
	TOTAL		**60,08**	**22,28**	**37,80**

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, 2024

Dari tabel pengurangan kumuh tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian pengurangan kumuh selama tahun 2024 seluas 22,28 hektar. Terdapat 2 (dua) kelurahan yang sudah tidak kumuh, yaitu Kelurahan Pesurungan Lor dan Kelurahan Mintaragen. Luasan kumuh di Kota Tegal masih tersisa seluas 37,80 hektar di akhir tahun 2024. Sisa luasan kumuh ini akan dijadikan baseline untuk penanganan kumuh di tahun 2025.

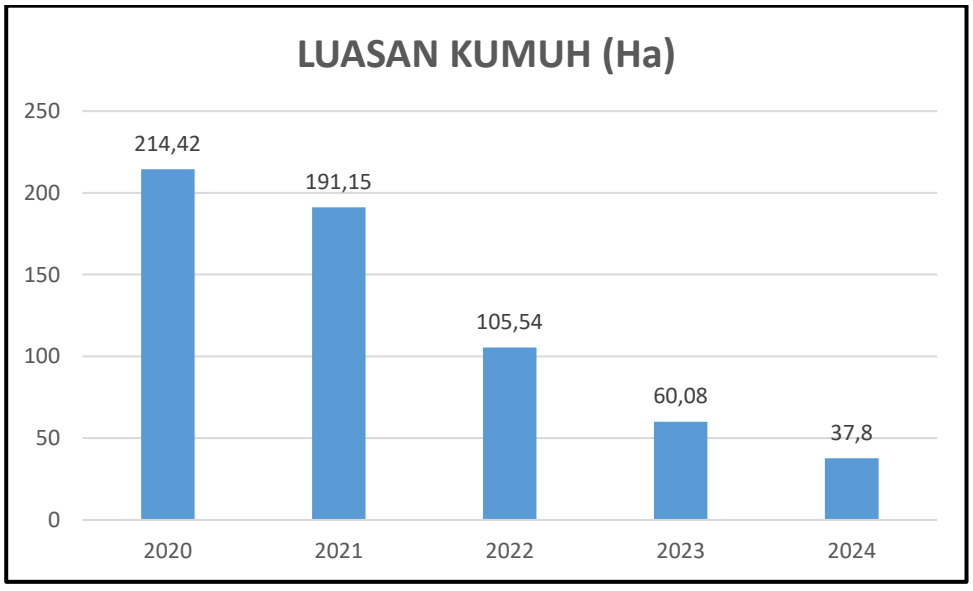
Berikut ini adalah persentase luasan kawasan kumuh di Kota Tegal setelah dilaksanakan penanganan tiap tahun.

Tabel 2.4
Persentase Luasan Kawasan Kumuh di Kota Tegal

NO	TAHUN	LUASAN KUMUH (HA)	PERSENTASE KEKUMUHAN
1	2020	214,42	5,40 %
2	2021	191,15	4,82 %
3	2022	105,54	2,66 %
4	2023	60,08	1,51 %
5	2024	37,80	0,95 %

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, 2024

Grafik 2.1
Luasan Kawasan Kumuh di Kota Tegal Tahun 2020 – 2024



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, 2024

Luasan kawasan kumuh di Kota Tegal dari tahun 2020 hingga akhir tahun 2024 bertahap mengalami penurunan menjadi 37,80 Ha atau sebesar 0,95%. Pengurangan ini karena adanya kolaborasi penanganan kumuh lintas OPD Teknis di Kota Tegal, yang diantaranya adalah DPU, Disperkim, DLH dan tanggungjawab sosial dari badan usaha/perusahaan.

Pada Tahun 2024 Persentase Luasan Perumahan dan Permukiman Layak Huni dari target 64,34% dengan realisasi sebesar 57,95% atau dengan capaian 90,07%. Capaian tersebut menunjukan bahwa realisasi masih lebih kecil dari target yang telah ditetapkan. Capaian yang hampir mencapai target ini karena adanya kolaborasi penanganan kumuh lintas OPD Teknis di Kota Tegal yang diantaranya adalah DPU, DLH, Dinkes, Pemadam Kebakaran (Satpol PP) dan badan usaha/perusahaan terkait dana alokasi tanggungjawab sosial.

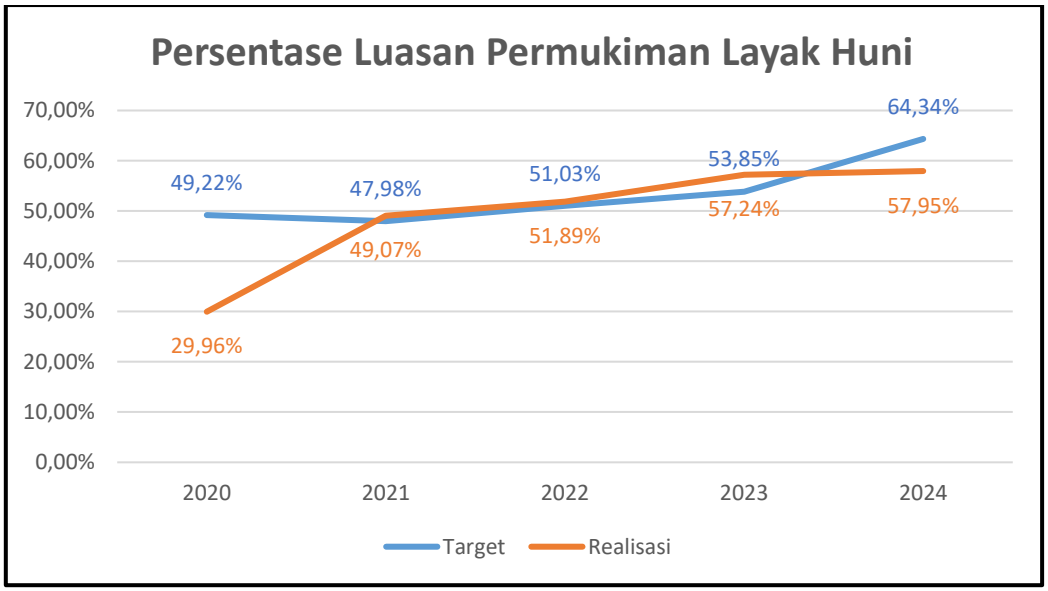
Perkembangan capaian luasan perumahan dan permukiman layak huni adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Persentase Luasan Permukiman Layak Huni

NO	TAHUN	TARGET	CAPAIAN / REALISASI	PERSENTASE
1	2020	49,22%	29,96%	60,88%
2	2021	47,98%	49,07%	102,27%
3	2022	51,03%	51,89%	101,70%
4	2023	53,85%	57,24%	106,30%
5	2024	64,34%	57,95%	90,07%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, 2024

Grafik 2.2
Persentase Luasan Permukiman Layak Huni



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, 2024

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	Capaian Kinerja pada Renstra Tahun 2024		Satuan	Tingkat Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi		
1.	Persentase luasan kawasan permukiman layak huni	-	55,91	57,95	Persen	103,65
2.	Jumlah Backlog	-	17.584	17.584	Rumah	102,73

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, 2024

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Di Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Tegal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp22.328.840.341,- dan realisasi sebesar Rp 21.692.631.697,- atau sebesar 97,15%. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal.

Salah satu sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat 4 indikator yaitu persentase pencegahan dan penanganan kawasan kumuh, persentase rumah layak huni, cakupan PSU perumahan dan jumlah backlog. Keempat indikator tersebut diharapkan dapat tercapai pada akhir tahun 2026 RPD Kota Tegal. Untuk dapat mencapai target dari keempat indikator tersebut membutuhkan kolaborasi pendanaan untuk penanganan kawasan kumuh, pemenuhan rumah layak huni dan fasilitasi/pemeliharaan PSU perumahan serta penyediaan perumahan untuk pengurangan backlog. Sumber pendanaan ini berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Indikator luasan permukiman layak huni pada tahun 2024 dipengaruhi oleh luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Tegal pada awal tahun 2024 yaitu seluas 60,08 Ha atau 22,28% dari luas Kota Tegal. Setelah dilaksanakan penanganan permukiman kumuh selama tahun 2024 dengan sumber pendanaan dari APBD Pemerintah Kota Tegal, diperoleh sisa luasan kumuh sebesar 37,80 Ha atau sebesar 0,95%. Luasan permukiman layak huni Kota Tegal pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 64,34% dengan realiasasi mencapai 57,95% atau sebesar 90,07%. Faktor pendorong hampir tercapainya target luasan permukiman layak huni ini salah satunya adalah penanganan infrastruktur yang dilaksanakan oleh OPD teknis terkait yang mempunyai kewenangan dalam upaya pengurangan kekumuhan di Kota Tegal.

Indikator jumlah backlog pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 18.077 unit dengan realisasi capaian backlog tahun 2024 sebesar 17.584. Faktor pendorong meningkatnya penanganan backlog salah satunya melalui peningkatan pelayanan pengurusan ijin siteplan perumahan pengembang, dimana beberapa di antaranya merupakan perumahan yang mengikuti Program Rumah Bersubsidi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Harapannya dengan tersedianya perumahan bersubsidi ini mampu meningkatkan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah. Selain itu juga adanya pemberian bantuan stimulan pembangunan rumah baru bagi MBR juga menjadi salah satu langkah intervensi pemerintah dalam penanganan backlog, baik itu melalui APBD Kota Tegal maupun APBD Provinsi Jawa Tengah.

Untuk indikator Persentase Rumah Layak Huni, pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 98,36% dan realisasi capaian sebesar 98,84% sehingga persentase capaian mencapai 100,49%. Salah satu faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah kecenderungan peningkatan pendanaan dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui APBD Kota Tegal yaitu sebanyak 635 unit dengan realisasi 634 unit di tahun 2024. Selain itu keterlibatan pihak non pemerintah dalam usaha peningkatan kualitas hunian masyarakat juga turut mendukung terwujudnya penanganan rumah tidak layak huni dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSSLP) atau Corporat Social Responsibility (CSR).

1) Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.7
Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	2024		
				Target RKPD	Realisasi	Persentase %
1	Persentase Rumah Layak Huni	%	98,83	98,36	98.84	100,49
2	Persentase Luasan Permukiman Layak Huni	%	57,24	64,34	57,95	90,07
3	Jumlah *Backlog*	Unit Rumah	18.077	18.077	17.584	102,73

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

2) Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan :

1. Beberapa kegiatan penanganan kawasan kumuh di Kota Tegal tidak tepat sasaran di lokasi basis RT/RW kawasan kumuh sesuai dengan SK Wali Kota Tegal No. 648/048.1/2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Tegal.
2. Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Tegal tidak mendapat bantuan infrastruktur untuk penanganan permukiman kumuh dari APBN maupun dari Provinsi.
3. Beberapa pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan RTLH tidak mengacu pada Database RTLH sesuai SK Walikota Tegal Nomor 648/079.B/2016 Tahun 2016. Hal ini disebabkan sebagian rumah yang terdaftar dalam SK

Walikota sudah tidak dapat dikategorikan sebagai RTLH karena adanya peningkatan kualitas rumah secara swadaya. Namun ada sebagian rumah yang tidak terdaftar dalam SK Walikota, yang mengalami penurunan kualitas bangunan sehingga layak untuk mendapat bantuan RTLH.

4. Keterbatasan pendataan perumahan khususnya penyediaan rumah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

Solusi :

1. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan OPD Teknis terkait yang mempunyai kewenangan dalam upaya pengurangan kekumuhan di Kota Tegal seperti (Dinas Kesehatan; DPUPR; DLH; PDAM; Satpol PP dan lain-lain) untuk mengalokasikan anggaran kegiatan sesuai dengan lokasi kekumuhan di Kota Tegal.
2. Mengajukan usulan pendanaan kegiatan penanganan kawasan kumuh ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya berdasarkan luasan kekumuhan (luasan kumuh 10 – 15 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi; Luasan kumuh diatas 15 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat).
3. Melakukan pendataan ulang atas Data base RTLH sesuai SK Walikota Tegal Nomor 648/079.B/2016 Tahun 2016 sehingga diperoleh data base RTLH yang sesuai dengan kriteria rumah tidak layak huni, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemberian bantuan RTLH baik itu dari APBD, APBN, maupun dari dana CSR.
4. Melaksanaan pendataan perumahan secara rutin setiap tahun sehingga diperoleh data perumahan yang akurat.

2.4. Reviu Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal dan analisis kebutuhan RKPD Kota Tegal Tahun 2026 dan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah dan analisis kebutuhan, baik pendanaan maupun nomenklatur program dan kegiatan. Reviu terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Tegal Tahun 2026

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**24.066.780.000**		**7.568.230.190**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kematangan Organisasi Daerah**	**persen**	**64,91**	**6.451.100.000**	**64,91**	**6.225.809.175**	
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**persen**	**100**	**2.750.000**	**100**	**2.750.000**	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	1.100.000	4	1.100.000	
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	dokumen	2	1.100.000	2	1.100.000	
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1	550.000	1	550.000	
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase capaian kegiatan administrasi keuangan**	**persen**	**100**	**4.256.000.000**	**100**	**4.156.209.175**	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	35	4.200.000.000	38	4.100.609.175	
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	56.000.000	12	55.600.000	
1.04.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase capaian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**3.700.000**	**100**	**3.750.000**	
1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	12	3.700.000	12	3.750.000	
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase capaian administrasi umum**	**persen**	**100**	**244.650.000**	**100**	**204.100.000**	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	1.450.000	5	1.500.000	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	37	25.000.000	37	22.000.000	
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	34	22.000.000	34	19.000.000	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	22.000.000	1	20.000.000	

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	15.400.000	4	13.000.000	
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	8.800.000	12	3.600.000	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	150.000.000	12	125.000.000	
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah terfasilitasi**	**persen**	**100**	**45.000.000**	**100**	**30.000.000**	
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	45.000.000	2	30.000.000	
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase capaian kegiatan penyediaan jasa penunjang**	**persen**	**100**	**1.745.000.000**	**100**	**1.658.000.000**	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	825.000.000	12	838.000.000	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	920.000.000	12	820.000.000	
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terfasilitasi**	**persen**	**100**	**154.000.000**	**100**	**171.000.000**	
1.04.01.2.09.0002`	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	9	62.000.000	9	58.000.000	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	60	62.000.000	60	83.000.000	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	33.000.000	1	30.000.000	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian**	**persen**	**81,00**	**1.325.000.000**	**81,00**	**475.277.000**	
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pendataan rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah**	**persen**	**100**	**50.000.000**	**100**	**7.363.900**	
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	dokumen	1	50.000.000	1	3.938.500	
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	-	-	1	3.425.400	

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase capaian kegiatan pembangunan/rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah**	**persen**	**100**	**267.000.000**	**100**	**108.254.600**	
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	unit rumah	5	267.000.000	2	108.254.600	
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Prosentase capaian kegiatan pembinaan pengelolaan rumah susun umum**	**persen**	**100**	**1.000.000.000**	**100**	**355.158.500**	
1.04.02.2.05.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	dokumen	1	1.000.000.000	1	355.158.500	
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Persentase capaian kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan**	**persen**	**100**	**8.000.000**	**100**	**4.500.000**	
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	laporan	1	8.000.000	1	4.500.000	
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase pencegahan dan penanganan kawasan kumuh**	**persen**	**2,44**	**2.135.000.000**	**2,44**	**245.441.615**	
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase capaian kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh**	**persen**	**100**	**500.000.000**	**100**	**55.918.900**	
1.04.03.2.02.0013	Penyusunan review/legalitas kebijakan bidang PKP	Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP	dokumen	1	400.000.000	-	-	
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	dokumen	1	100.000.000	1	55.918.900	
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase capaian kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh**	**persen**	**100**	**1.635.000.000**	**100**	**189.522.715**	
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	laporan	1	350.000.000	1	11.265.600	
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	hektar	0,4	1.285.000.000	0,4	178.257.115	
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**persen**	**98,88**	**11.900.000.000**	**98,86**	**354.702.400**	
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase capaian kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh**	**persen**	**100**	**11.900.000.000**	**100**	**354.702.400**	

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	unit rumah	549	11.900.000.000	5	354.702.400	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan PSU Perumahan**	**persen**	**63,00**	**2.254.680.000**	**71,00**	**267.000.000**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Prosentase capaian kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan**	**persen**	**100**	**2.254.680.000**	**100**	**267.000.000**	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	dokumen	25	240.000.000	1	7.500.000	
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	laporan	7	53.000.000	5	28.875.000	
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	lokasi	25	1.961.680.000	2	230.625.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dan seluruh komponen masyarakat yang terkoordinir dengan baik antar badan/dinas yang tekait untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Tegal. Untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam pembangunan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal telah melaksanakan dan mengikuti musrenbang baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan untuk menampung aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2026. Adapun tahapan yang dilalui dalam menghimpun aspirasi masyarakat ini adalah telah dilaksanakan musrenbang tingkat kelurahan yang usulannya menjadi bahan pertimbangan dalam musrengbang di tingkat kecamatan. Hasil musrenbang kecamatan ini merupakan usulan prioritas dari masing-masing kelurahan dengan metode skoring untuk menentukan prioritas di kecamatan. Dari hasil musrenbang kecamatan ini akan dilakukan verifikasi sebelum dimasukan ke Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2026.

Tabel 2.9. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Pengembangan Perumahan				
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
a.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Tegal Barat	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian	20 unit	Pokir DPRD
		Margadana		6 unit	
		Tegal Selatan		4 unit	
2.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
a.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Tegal Timur	Prosentase rumah layak huni	133 rumah	Pokir DPRD
		Tegal Barat		76 rumah	
		Tegal Selatan		114 rumah	
		Margadana		89 rumah	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
3.	Program Kawasan Permukiman				
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
a.	Pavingisasi Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman Kumuh	Margadana	Persentase pencegahan dan penanganan kawasan kumuh	180 m2	Pokir DPRD
		Sumurpanggang		200 m2	
4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				
	Urusan Penyelanggaraan PSU Perumahan				
a.	Pavingisasi Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman Tidak Kumuh	Kejambon	Cakupan PSU Perumahan	470 m2	Pokir DPRD
		Panggung		381 m2	
		Slerok		10 m2	
		Kemandungan		200 m2	
		Tegalsari		350 m2	
		Debong Tengah		300 m2	
		Randugunting		100 m2	
		Cabawan		50 m2	
		Kaligangsa		100 m2	
		Pesurungan Lor		660 m2	
b.	Pengurugan Makam	Slerok		120 m3	
		Debong Tengah		260 m3	
		Keturen		1 paket	
		Margadana		100 m3	
		Sumurpanggang		1 paket	
c.	Pemagaran Makam	Kraton		100 m2	
		Keturen		1 paket	
d.	Pengadaan Mesin Potong Rumput Untuk Makam	Panggung		1 unit	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2026 meliputi :

a. Pertumbuhan ekonomi
b. Peningkatan daya saing
c. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
d. Peningkatan produktivitas pertanian
e. Pengembangan pusat pertumbuhan baru
f. Pengembangan ekosistem pariwisata
g. Program makan bergizi gratis

Berikut delapan prioritas nasional tersebut :

a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2026 urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman tidak masuk dalam arah kebijakan pembangunan tersebut. Tetapi dalam prioritas pembangaunan nasional urusan wajib bidang perumahan dan kawasan permukiman masuk dalam prioritas yang ketiga, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan prioritas keenam, yaitu pemberantasan kemiskinan.

Pengembangan insfrastruktur dengan pencegahan/ penataan/ penangananan kawasan permukiman kumuh maupun yang tidak kumuh dan pembangunan/pemeliharaan prasarana dan sarana umum perumahan serta pembangunan perumahan. Pemberantasan kemiskinan turut serta dilakukan dengan pemberian bantuan rehab rumah tidak layak huni maupun pembangunan baru rumah layak huni dan fasilitasi penghunian di rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan. Tujuan adalah pernyataan yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dan dilaksanakan setiap tahunnya melalui Renja OPD.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025–2029 adalah sebagaimana tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026
Meningkatnya Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak		Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	82,00
	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase luasan perumahan dan permukiman layak huni	59,89
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	68,85

.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tujuan dan sasaran rencana kerja Tahun 2026 dan dengan memperhatikan kepada hasil evaluasi maupun capaian pelaksanaan rencana kerja tahun lalu, serta memperhatikan target kinerja yang direncanakan dalam Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2026 mencakup 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Selanjutnya program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh unit pelaksana yang membidangi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2026.

Rencana program dan kegiatan prioritas Tahun 2026 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026, diawali dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, forum perangka daerah tingkat perangkat daerah, forum lintas perangkat daerah di tingkat kota, konsultasi publik rancangan awal RKPD hingga Musrenbang RKPD Tahun 2026, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman, baik unsur masyarakat, unsur kecamatan/kelurahan, unsur perangkat daerah, unsur lembaga swadaya masyarakat maupun unsur legislatif, dll.

4.1. Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program Pengembangan Perumahan

   Program ini diharapkan dapat membantu rumah tangga untuk dapat memiliki akses terhadap hunian yang layak. Program ini direncanakan melalui empat kegiatan, yaitu :

   a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

      - Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib bidang perumahan.

b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
    - Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib bidang perumahan.

c. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
    - Kegiatan ini adalah fasilitasi hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki hunian sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar.

d. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
    - Kegiatan ini adalah untuk membantu pengurangan backlog di Kota Tegal dengan memberikan kemudahan perizinan pembangunan/pengembangan perumahan oleh para pengembang.

2. Program Kawasan Permukiman

   Program ini diharapkan dapat mengendalikan tumbuhnya kawasan kumuh baru dan menangani kawasan kumuh yang sudah ada.

   a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
       - Kegiatan ini adalah koordinasi dengan OPD dan stake holder terkait dalam perencanaan, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.

   b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
       - Kegiatan ini adalah upaya fisik pengurangan/penanganan kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

   Program ini diharapkan dapat meningkatkan rumah layak huni guna menciptakan lingkungan permukiman yang tidak kumuh.

   a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
       - Kegiatan ini adalah selain sebagai upaya pencegahan munculnya kawasan permukiman kumuh baru juga sebagai bagian dari upaya penanganan kemiskinan.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

   Program ini adalah untuk mendukung fungsi hunian dengan pengendalian keberadaan dan fungsi fasilitas lingkungan perumahan dengan adanya PSU di lingkungan perumahan. Program ini hanya memiliki satu kegiatan yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan pelaporan mengenai PSU Perumahan, yaitu kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Program ini adalah program penunjang dari program-program yang ada terkait pelaksanaan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Program penunjang ini memiliki beberapa kegiatan, yaitu :

   a. Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Kegiatan ini adalah untuk menghasilkan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen laporen evaluasi.

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Kegiatan ini adalah kegiatan pembayaran gaji dan honorarium ASN.

   c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

      Kegiatan ini adalah pembayaran honorarium pengelola barang.

   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Kegiatan ini adalah kegiatan yang secara umum mendukung kegiatan-kegiatan lain dari sisi kebutuhan rumah tangga perangkat daerah.

   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

      Kegiatan ini adalah terkait penyediaan dana guna pembayaran tagihan rutin bulanan dan jasa kebersihan dan keamanan.

   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

      - Kegiatan ini adalah pemeliharaan gedung dan peralatan-peralatan yang ada pada perangkat daerah.

4.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada setiap awal tahun anggaran dan merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan. Rencana kinerja tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 mendasari pada pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal merupakan aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan program yang telah direncanakan untuk memperoleh keluaran (output), dan hasil (outcome) yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebagai masukannya (input). Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal dengan mengacu kepada visi dan misi kepala daerah terpilih, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan melaksanakan 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan.

Program dan kegiatan yang tersebar ke berbagai kawasan adalah :

1. Program Kawasan Permukiman dengan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Hektar yang lokasinya tersebar di berbagai kelurahan di Kota Tegal.
2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota yang lokasinya tersebar di berbagai kelurahan di Kota Tegal.
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan yang lokasinya tersebar di berbagai kelurahan di Kota Tegal.

Program dan kegiatan yang terfokus pada kawasan tertentu adalah :

1. Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang terfokus pada rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dikelola.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah program kegiatan yang terfokus pada kantor perangkat daerah guna menunjang fungsi pemerintahan dan program-program lainnya.

Program dan kegiatan yang terfokus pada kelompok masyarakat tertentu adalah :

1. Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang berfokus pada masyarakat yang rumahnya menjadi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota, serta kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang terfokus pada pelayanan kepada para masyarakat/pengembang perumahan yang mengurus izin pembangunan/pengembangan perumahan.
2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota yang sasarannya terfokus pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

Dari semua progam kegiatan yang ada, perkiraan kebutuhan dana adalah sekitar Rp 20.389.027.510,- yang bersumber dari APBD Kota Tegal Tahun 2026.

4.3. Kesesuaian Rumusan Program dan Kegiatan Dengan Ranwal RKPD

Terdapat rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dari jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Progam / Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	(6)		(7)	(8)
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**24.066.780.000**	**Sebagian besar anggaran adalah anggarah pokir DPRD yang jumlahnya fluktuatif**		**20.389.027.510**
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kematangan Organisasi**	**persen**	**37**	**6.451.100.000**	**Target indikator dan rencana anggaran lebih kecil menyesuaikan kondisi dan kebijakan pemda**	**37**	**6.954.818.105**
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	persen	100	2.750.000	Sudah sesuai	100	2.749.750
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian kegiatan administrasi keuangan	persen	100	4.256.000.000	Menyesuaikan pagu anggaran yang diberikan	100	4.524.868.575
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persen	100	3.700.000	Pagu anggaran mengikuti tahun sebelumnya	100	3.300.000
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase capaian administrasi umum	persen	100	244.650.000	Pagu anggaran berkurang menyesuaikan kebutuhan yang ada	100	209.948.714
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah terfasilitasi	persen	100	45.000.000	Pagu anggaran berkurang menyesuaikan kebutuhan	100	52.735.900
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase capaian kegiatan penyediaan jasa penunjang	persen	100	1.745.000.000	Pagu anggaran bertambah karena kenaikan standar upah tenaga outsourcing	100	1.947.951.936
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terfasilitasi	persen	100	154.000.000	Pagu anggaran bertambah banyak untuk pemeliharaan gedung kantor	100	213.263.230
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian (Lama)** **Presentase Penyediaan Hunian Yang Layak (Baru)**	**persen**	**81,00**	**1.325.000.000**	Alokasi pagu anggaran yang berkurang karena kebijakan pemda dan perubahan indikator menyesuaiakan Renstra baru	**4,21**	**560.551.430**
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pendataan rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	persen	100	50.000.000	Pembagian pagu anggaran sesuai prioritas karena pertimbangan kemampuan keuangan daerah	100	7.288.350
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase capaian kegiatan pembangunan/rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	persen	100	267.000.000	Pembagian pagu anggaran sesuai prioritas karena pertimbangan kemampuan keuangan daerah	100	193.703.900

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Progam / Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	(6)		(7)	(8)
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Prosentase capaian kegiatan pembinaan pengelolaan rumah susun umum	persen	100	1.000.000.000	Rencana anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah	100	355.059.180
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase capaian kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	persen	100	8.000.000	Rencana anggaran berkurang karena efisiensi pemakaian sesuai kebutuhan	100	4.500.000
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase pencegahan dan penanganan kawasan kumuh**	**persen**	**2,44**	**2.135.000.000**	**Alokasi pagu anggaran yang berkurang karena kebijakan pemda dan perubahan target kinerja karena target sebelumnya telah tercapai**	**2,50**	**405.025.066**
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase capaian kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	persen	100	500.000.000	Alokasi pagu anggaran yang berkurang karena kebijakan pemda	100	111.382.350
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase capaian kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	persen	100	1.635.000.000	Alokasi pagu anggaran yang berkurang karena kebijakan pemda	100	293.642.716
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**persen**	**98,88**	**11.900.000.000**	**Penurunan sedikit target indikator dari rencana awal karena pendataan ulang data Rumah Tidak Layak Huni**	**97,88**	**10.982.240.600**
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase capaian kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	persen	100	11.900.000.000	Anggaran terbesar dari pokir DPRD yang tidak bisa diprediksi	100	10.982.240.600
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan PSU Perumahan**	**persen**	**63,00**	**2.254.680.000**	**Perubahan target indikator dari rencana awal karena target telah tercapai**	**67,00**	**1.486.392.309**
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase capaian kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan	persen	100	2.254.680.000	Anggaran terbesar dari pokir DPRD yang tidak bisa diprediksi	100	1.486.392.309

Tabel 4.2
Rencana Kerja Anggaran Sub Kegiatan Tahun 2026
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(7)	(8)
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**20.389.027.510**
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kematangan Organisasi**	**persen**	**37**	**6.954.818.105**
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**persen**	**100**	**2.749.750**
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	1.099.900
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	1.099.900
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	549.950
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase capaian kegiatan administrasi keuangan**	**persen**	**100**	**4.524.868.575**
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40	4.474.348.575
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	50.520.000
1.04.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase capaian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**3.300.000**
1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKP	Laporan	12	3.300.000
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase capaian administrasi umum**	**persen**	**100**	**209.948.714**
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	1.561.000
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	Paket	38	24.194.000
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	13	18.998.964
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	19.995.000
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediaka	Paket	4	12.999.750
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	7.200.000
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	125.000.000
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah terfasilitasi**	**persen**	**100**	**52.735.900**
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	52.735.900

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(7)	(8)
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase capaian kegiatan penyediaan jasa penunjang**	**persen**	**100**	**1.947.951.936**
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	841.801.500
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.106.150.436
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terfasilitasi**	**persen**	100	**213.263.230**
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	57.150.000
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	68.160.830
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	65	87.952.400
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Presentase Penyediaan Hunian Yang Layak**	**persen**	**4,21**	**560.551.430**
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pendataan rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah**	**persen**	**100**	**7.288.350**
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	3.863.100
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	3.425.250
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase capaian kegiatan pembangunan/rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah**	**persen**	**100**	**193.703.900**
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	2	193.703.900
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Prosentase capaian kegiatan pembinaan pengelolaan rumah susun umum**	**persen**	**100**	**355.059.180**
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	1	355.059.180
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Persentase capaian kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan**	**persen**	**100**	**4.500.000**
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1	4.500.000

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(7)	(8)
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase pencegahan dan penanganan kawasan kumuh**	**persen**	**2,50**	**405.025.066**
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase capaian kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh**	**persen**	**100**	**111.382.350**
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	111.382.350
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase capaian kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh**	**persen**	**100**	**293.642.716**
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	2.650.000
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Hektar	0,5	290.992.716
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**persen**	**97,88**	**10.982.240.600**
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase capaian kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh**	**persen**	**100**	**10.982.240.600**
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	517	10.982.240.600
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan PSU Perumahan**	**persen**	**67,00**	**1.486.392.309**
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Prosentase capaian kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan**	**persen**	**100**	**1.486.392.309**
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1	84.643.850
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	2	1.372.873.659
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	5	28.874.800

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2026 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan dukungan aktif dari seluruh stakeholder baik di lingkungan internal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun seluruh stakeholder terkait. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan serta terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Disperkim Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang strategis dalam pencapaian pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis Disperkim Kota Tegal dan RPD Kota Tegal tahun 2025-2026.
2. Seluruh perangkat di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal berkewajiban melaksanakan rencana kerja program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan rencana kerja Tahun 2026 difokuskan untuk pencapaian target kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis dan RPD 2025-2026.
4. Rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2026 merupakan dasar penyusunan dokumen penganggaran kegiatan Tahun 2026.
5. Untuk menjamin pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja, maka harus dilakukan pengendalian dan evaluasi.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja terdapat hal-hal yang memerlukan penyesuaian dan penyelarasan, baik menyangkut kegiatan, anggaran, sasaran maupun lokasi kegiatan, maka akan dilakukan perubahan rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tegal, 21 Juli 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA TEGAL

Ir. EKO SETYAWAN, MUM
Pembina Utama Muda
NIP.196509201996031001